

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Wilayah Pasifik Selatan berdasarkan geografis berada pada Samudera Pasifik, dimana terdapat tiga gugusan kepulauan yang dikelompokkan secara etnografi atau berdasarkan pada wilayah budaya yakni Melanesia, Micronesia, Polynesia. Melanesia merupakan sekelompok pulau yang membentang mulai Kepulauan Papua Barat Indonesia arah timur hingga Samudra Pasifik Barat, Australia, dan juga Australia bagian utara serta timur laut.<sup>1</sup> Melanesia berasal dari kata melas atau mela yang artinya hitam, dan nesos atau nesoi yang berarti pulau. Dengan kata lain, terdapat pulau yang dihuni oleh orang-orang yang ber ras kulit hitam. Mereka menganut nilai-nilai budaya yang disebut dengan *Melanesian Way*. Di Melanesia menganut *achieved status* yang berarti masyarakat mendapat jabatan baik di pemerintahan, politik, dan kelas sosial berdasarkan kemampuannya, sehingga ada ruang dalam mencapai status yang lebih tinggi. Negara yang tergabung di kelompok Melanesia antara lain Fiji, Papua Nugini, Vanuatu, Timor Leste, New Caledonia serta deretan pulau kecil di kawasan.<sup>2</sup>

Negara-negara yang terbentuk atas persemakmuran dari Inggris adalah negara pada kawasan Pasifik Selatan, Fiji yang termasuk ke dalam wilayah

---

<sup>1</sup> Wirda Wanda Sari Bekarekar, *ALASAN INDONESIA DALAM MELAKUKAN HUBUNGAN KERJASAMA DENGAN MELANESIAN SPEARHEAD GROUP (MSG)*, Prosiding Interdisciplinary Postgraduate Student Conference 1<sup>st</sup>, Yogyakarta: Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, hal. 246.

<sup>2</sup> Baiq L.S.W. Wardhani, 2015, "*Kajian Asia Pasifik*", Malang: Intrans Publishing, hal. 12.

Melanisia yang bertetangga dengan Samoa di timur laut, Vanuatu di sebelah timur laut dimana negara Vanuatu menarik karena merupakan negara pulau kecil dengan sistem demokrasi yang dinamis dimana pemerintahannya ditata berlandaskan konstruksi partai-partai yang beriring-iring pada pemilu, dan Tonga di sebelah timur,<sup>3</sup> Fiji adalah negara kepulauan yaitu Republik kepulauan Fiji, bernama lokal *matanitu ko viti*, bentuk pemerintahannya republik parlementer dimana Presiden selaku kepala negaranya serta Perdana Menteri menjadi kepala pemerintahan, yang beribukota di Suva.

Kawasan Pasifik Selatan terkelompokkan ke dalam negara dengan kepulauan yang kecil dengan keadaan stabilitas serta domestiknya yang rawan, sanggahan utama di kawasan pasifik selatan tidak didasarkan pada bahaya tradisional semacam invansi asing atau masalah perbatasan.<sup>4</sup> Banyak permasalahan yang timbul menjadi tantangan pada stabilitas perdamaian serta keamanan di kawasan Pasifik Selatan, semacam pertikaian domestik, kejahatan antar negara, eksploitasi manusia serta penangkapan ikan tanpa izin.

Banyak negara Pasifik selatan semacam Papua Nugini (PNG), Fiji, Samoa melawan pandangan negara maju karena rendahnya identitas nasional negara tersebut. Terutama di negara Fiji, penolakan terhadap gagasan modernitas, demokrasi telah menjadi kebalikan dari bagian negara dan pemimpin yang ortodoks. Hal tersebut diakibatkan adanya kesenjangan sosial serta ekonomi

---

<sup>3</sup> Muhammad Syaprin Zahidi, *Analisis Kebijakan Luar Negeri Vanuatu Dalam Mendukung ULMWP Untuk Memisahkan Diri Dari Indonesia*, Vol, 3, No, 1 (Mandala: Jurnal Ilmu Hubungan Internasional, 2020), hal. 72.

<sup>4</sup> Secutity Council, *Update Report No. 4: Fiji*, diakses dalam [https://www.securitycouncilreport.org/update-report/lookup\\_c\\_gIKWLeMTIsG\\_b\\_5108563.php?print=true%26prev=search](https://www.securitycouncilreport.org/update-report/lookup_c_gIKWLeMTIsG_b_5108563.php?print=true%26prev=search) (4/3/2023, 13:13 WIB)

antara penduduk imigran dan penduduk asli India sehingga menimbulkan gejolak politik serta ekonomi di negara ini.

Konflik yang sering terjadi setelah kemerdekaan Fiji melemahkan nilai-nilai politik dan demokrasi. Banyak konflik politik di Fiji yang berkaitan pada isu etnis yang menjadi ciri politik Fiji. Fiji merupakan negara dengan jumlah penduduk yang berdasarkan etnis, di antaranya ialah permasalahan hak atas tanah.

Di lain sisi, militer terlibat dalam politik dikarenakan kurangnya lembaga politik Fiji yang ampuh. Faksi politik adalah salah satunya di antara lembaga politik di berbagai negara berlandaskan kelompok etnis terpilih serta bertujuan guna bergandengan tangan untuk mengatur negara melalui metode yang memungkinkan seluruh orang guna berpartisipasi.

Meskipun partai politik di Fiji adalah partai politik multietnis serta mengaku menjadi perwakilan seluruh masyarakat Fiji untuk mewujudkan pemerintahan multietnis, tetapi nyatanya partai politik yang dibuat berlandaskan kelompok etnis khusus akibatnya anggota partai politik biasanya adalah orang-orang yang berpolitik, orang yang duduk di pemerintahan. Terkadang, tidak ada partai politik yang mampu mendapatkan suara mayoritas pada suatu pemilu. Oleh karena itu, partai politik di Fiji perlu berkolaborasi bersama partai lain guna memperkokoh posisinya.

Isu politik Fiji sangat menarik untuk dikaji, karena pada tahun 1970 setelah merdeka kerap kali terjadi kudeta dalam pergolakan politik Fiji, selama dua dekade terjadi empat kali kudeta. Pada tanggal 14 Mei 1987, terjadi kudeta pertama di Fiji yang ini diketuai Letnan Kolonel Sitiveni Rabuka. Rabuka,

bersama angkatan militernya, memasuki gedung parlemen serta berhasil menumbangkan pemerintahan Timoci Bavadra. Kudeta tersebut dipicu pada kekhawatiran bahwasannya pemerintahan saat itu dikendalikan atas kelompok Indo-Fiji.

Setelah memimpin kudeta, Rabuka, yang merupakan anggota Fijian Political Party (Soqosoqo Vakavuleva ni Taukei), memberikan kewenangan terhadap Gubernur Jendral Ratu Sir Penaia Ganilau. Langkah ini diambil dengan harapan Ganilau dapat menjalankan keperluan etnis Fiji. Ganilau kemudian berusaha guna merestorasi konstitusi yang sebelumnya telah dicabut.

Pada 25 September 1987, Rabuka melancarkan kudeta kedua. Setelah itu, pada 5 Desember, ia membentuk pemerintahan sementara dan menunjuk Kamisese Mara menjadi Perdana Menteri serta Ganilau selaku Presiden. Rabuka akhirnya memaklumkan Fiji menjadi negara republik.<sup>5</sup>

Pada bulan Juli 1990, pemerintahan Fiji mengesahkan konstitusi baru yang memberikan lebih banyak kursi legislatif kepada suku Fiji (rakyat asli). Fakta angka di tahun 1989 menunjukkan bahwa semenjak tahun 1946, etnis Fiji telah menjadi dominan penduduk. Konstitusi 1990 tersebut memastikan dominasi etnis Fiji dalam kekuasaan negara. Akibat diresmikannya konstitusi ini, melebihi 12.000 ras Indo-Fiji serta suku minoritas yang lain melupakan Fiji, yang mengakibatkan sulitnya ekonomi akibat emigrasi besar-besaran tersebut.<sup>6</sup>

Kudeta berikutnya terjadi pada Mei 2000, diketuai oleh George Speight, juga dikenal sebagai Ilikimi Naitini, seorang nasionalis ekstremis yang berasal

---

<sup>5</sup> Nohlen, Dieter, *Kamus Dunia Ketiga*, Grasindo, Jakarta, 1994, hal 186.

<sup>6</sup> Brown Peter, *Australian Influence in the South Pacific*, Australian Defence College, 2012.

dari etnis Fiji dengan campuran Eropa dan berpotensi sebagai pengusaha. Speight, bersama para pendukungnya yang bersenjata secara ilegal, melancarkan kudeta ini sebagai bentuk penolakan terhadap kekuasaan yang dimiliki oleh komunitas India pada Kepulauan Fiji.<sup>7</sup>

Mahendra Chaudry, bersama keanggotaan parlemen lainnya, ditangkap oleh sebuah kelompok bersenjata yang dipimpin oleh Speight. Speight menilai bahwasannya etnis Indo-Fiji mengganggu hak penduduk asli Fiji, dan memaklumkan konstitusi terbaru yang menghapus kebebasan politik ras Indo Fiji. Speight memberhentikan Perdana Menteri Chaudry serta Presiden Kamisese Mara, lalu mengucap ikrar menjadi Perdana Menteri serta mengumumkan Ratu Jope Seniloli menjadi Presiden. Frank Bainimarama, pada waktu tersebut memimpin militer, terlibat guna menstabilkan situasi serta mengeluarkan kebijakan penangkapan mereka yang melakukan kudeta. Speight akhirnya disekap dalam tahanan pulau Nukulau yang terletak pada perairan pantai Suva akan gugatan pengkhianatan terkait penyerbuan atas parlemen serta penyeranaan Perdana Menteri Chaudry.

Mendekati akhir tahun 2000, demokrasi berhasil dipulihkan dan militer menunjuk Laisenia Qarase, seorang mantan banker dari etnis Fiji, menjadi Perdana Menteri sementara. Qarase dipilih guna memberantas krisis politik serta membenahi hubungan internasionalnya. Meskipun diangkat oleh militer, Qarase berkomitmen untuk mendirikan pemerintahan demokratis yang bebas dari kekuasaan militer.

---

<sup>7</sup> Diakses dari <http://www.hamline.edu/apakabar/basisdata/2000/05/22/2002.html/>

Di bulan Agustus 2005, Qarase mempromosikan regulasi pemulihan hubungan, ketenangan, toleransi serta kesatuan yang ditujukan kepada mereka yang mendukung kudeta, serta George Speight, tersangka kudeta tahun 2000. Tetapi, langkah ini menuai kritik serta pengancaman oleh militer. Frank Bainimarama kembali mengkritik kebijakan kontroversial lainnya. Kritik Bainimarama ini menyebabkan ketegangan antara dirinya dan pemerintahan yang berkuasa, serta membuat sebagian politisi menudingnya ikut campur pada urusan politik.

Kurang lebih pekan sebelum itu, Bainimarama menuding pemerintah terlibat dalam tindak suap serta menggertak akan melaksanakan kudeta, yang akhirnya terwujud melalui perampasan kewenangan atas militer di tanggal 5 Desember 2006.<sup>8</sup>

Bainimarama muncul menjadi diktator Fiji setelah kudeta, membangun pemerintahan sementara berjumlah 13 individu. Pada 5 Desember 2006, ia melantik Ratu Josefa Iloilo menjadi Presiden serta merujuk Jona Senilagakali selaku Perdana Menteri mulai 5 Desember 2006 hingga 4 Januari 2007, hingga akhirnya Presiden Fiji dengan resmi melantik Bainimarama menjadi Perdana Menteri di tanggal 5 Januari 2007.

Australia serta Selandia Baru secara tegas mengutuk pengambilalihan kekuasaan oleh militer di Fiji. Alexander Downer, Menteri Luar Negeri Australia, dalam pidatonya di badan legislatif Canberra, mengingatkan bahwa tindakan

---

<sup>8</sup> “Kudeta militer Fiji” diakses dari <http://dw.de/p/CPAc>

militer tersebut berpotensi merusak bidang ekonomi Fiji. Pada orasinya Alexander Downer mengutarakan:

*“Komandan militer Fiji Bainimarama bersikeras untuk menghancurkan demokrasi serta melemahkan konstitusi. Jika komandan ingin mengetahui pendapat dunia atas aksi yang dilakukan militer, seharusnya ia menghormati konstitusi dan membiarkan institusi yang bersangkutan melakukan pekerjaannya”.*<sup>9</sup>

Australia aktif berkomitmen dalam mendukung pemulihan demokrasi di Fiji, sebagai respons terhadap kudeta militer yang dilaksanakan atas Frank Bainimarama yang menumbangkan pemerintahan sipil.<sup>10</sup> Langkah ini diambil untuk mencegah potensi penyebaran dampak negatif ke negara-negara lain di wilayah Pasifik Selatan.

Australia tak ingin terjadinya kudeta militer yang mengancam demokrasi pada kawasan ini dikarenakan hal tersebut mampu membahayakan keamanan Australia. Saat kudeta pertama terjadi, Perdana Menteri Fiji, Laisenia Qarase, mendesak bantuan campur tangan dari pasukan Australia untuk melawan kudeta yang diketuai Frank Bainimarama. Tetapi, permohonan ini ditangksi oleh Perdana Menteri Australia saat itu, John Howard, dikarenakan Australia enggan terlibat langsung pada krisis politik di Fiji. Namun, John Howard masih mengutuk keras aksi kudeta militer yang mengabaikan prinsip demokrasi konstitusional.

Australia, sebagai kekuatan besar di Pasifik Selatan, memiliki peran krusial guna mempromosikan nilai-nilai demokrasi dan mengembangkan kawasan

---

<sup>9</sup> *Ibid.*

<sup>10</sup> Baiq L.S.W. Wardhani 2015. *“Kajian Asia Pasifik”* Malang: Intrans Publishing, hal. 46.

tersebut. Australia menganggap butuh untuk memainkan peran strategisnya dalam hal ini. Mereka tidak menghendaki adanya kudeta militer yang melanggar demokrasi pada wilayah tersebut dikarenakan hal tersebut mampu membahayakan keamanan negara Australia. Kudeta di Fiji pada tahun 2006 dianggap berpotensi menyebar serta memicu efek berantai pada negara lain di Pasifik Selatan yang rentan terhadap fluktuasi politik dan keamanan internal.<sup>11</sup>

Australia mempererat kerja sama perdagangan yang signifikan dengan Fiji. Jumlah perdagangan antara kedua negara ini relatif besar daripada dengan negara lain di Pasifik. Fiji sebagai tujuan ekspor utama Australia untuk berbagai produk seperti gandum, gas petroleum cair, minuman keras, kain sintetis, dan rajutan. Di sisi lain, Australia mengimpor sejumlah besar sayuran, emas, busana, dan sereal dari Fiji. Hal ini menunjukkan bahwa hubungan perdagangan antara Australia dan Fiji memiliki dampak ekonomi yang signifikan dan saling menguntungkan bagi kedua negara.

Respon Australia ke Fiji yaitu melalui hadirnya campur tangan, Australia memutuskan berupaya dalam memulihkan demokrasi di negara Fiji serta mengurangi jumlah investasi yakni penjatuhan sanksi ekonomi serta sanksi pariwisata dengan mempersulit masyarakat untuk berpindah dari Fiji ke Australia maupun oleh Australia ke Fiji serta memprovokasi Pasific Island Forum (PIF) dalam menanggukkan Fiji pada organisasi regional. Penanggukan yang dilakukan Australia dengan tujuan menghindari efek domino yang dikhawatirkan dapat menyalur ke negara-negara di kawasan Pasifik Selatan. Australia tak ingin kudeta

---

<sup>11</sup> DW, *Kudeta Militer Melanda Fiji*, diakses dalam <https://www.dw.com/id/kudeta-militer-di-fiji/a-2956694> (23/3/2023, 22:22 WIB)



militer yang sama di kawasan yang melanggar demokrasi terjadi lagi karena menyebabkan keamanan Australia terancam. Perdana Menteri Fiji pada awal terjadi kudeta militer tahun 2006 di Fiji meminta Australia untuk intervensi pasukannya yang ditujukan agar membantu dalam menghadapi kudeta militer yang dipimpin Frank Bainamarama.

Kudeta Fiji tahun 2006 memunculkan berbagai bentuk usaha serta upaya Australia dalam merespon hal yang terjadi di Fiji. Australia sebagai great power di kawasan tertarik akan kudeta yang terjadi di Fiji yang mana ialah negara dalam lingkup kawasan pasifik selatan yang tentu perlu adanya sikap, konflik yang terjadi dalam kudeta Fiji tahun 2006 ini dikhawatirkan dapat membentuk kebaruan dalam budaya yang nantinya dapat menimbulkan instabilitas terhadap keamanan di kawasan. Kudeta Fiji dianggap berpengaruh di berbagai kalangan karena dalam kudeta Fiji ini banyak nilai demokrasi yang dilanggar oleh militer dengan diambil paksa pemerintahan yang kemudian membubarkan parlemen. Kudeta Fiji mendapat perhatian penuh dari negara kawasan sebab kudeta ini sebagai kudeta paling berpengaruh, karena nilai demokrasi yang ditentang melalui pengambilan paksa pemerintahan atas militer serta adanya pembubaran parlemen.<sup>12</sup>

Penelitian ini akan memberikan gambaran mengenai Australia yang menjadi salah satu negara besar di kawasan yang memiliki kapabilitas yang dapat memberikan pengaruh ke negara-negara di kawasan dengan menganalisis bagaimana upaya intervensi Australia sebagai great power terhadap Fiji pasca

---

<sup>12</sup> Kudeta Militer di Fiji, *Op. Cit.*

kudeta militer pada tahun 2006. Mengingat berbagai usaha Australia dalam mendorong serta menjaga keamanan negara di kawasan Pasifik Selatan khususnya Fiji agar dapat memiliki sebuah prespektif dalam keamanan di kawasan.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Penelitian ini akan menelaah mengapa Australia sebagai negara Great Power melakukan intervensi terhadap Fiji pasca kudeta militer pada tahun 2006?

## **1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1.3.1 Tujuan Penelitian**

Penelitian ini memiliki tujuan guna memperoleh pemahaman dan juga melakukan analisis mendalam terhadap upaya intervensi Australia sebagai great power pada wilayah Pasifik Selatan kepada Fiji Pasca kudeta militer Fiji tahun 2006.

### **1.3.2 Manfaat Penelitian**

#### **1.3.2.1 Manfaat Akademis**

Peneliti berkeinginan bahwa penelitian ini akan menghadirkan sumbangan yang baik untuk perkembangan studi Ilmu Hubungan Internasional, terkhusus dalam konteks masalah yang melibatkan Fiji dan Australia di Pasifik Selatan. Penelitian ini diharapkan dapat menyajikan pengetahuan yang berharga serta menjadi referensi penting bagi penelitian-penelitian selanjutnya dalam bidang Ilmu Hubungan Internasional, khususnya bagi mereka yang tertarj dengan isu

kudeta di Fiji serta hubungannya dengan Australia di wilayah Pasifik Selatan di masa depan.

### **1.3.2.2 Manfaat Praktis**

Harapan penulis dalam penelitian ini bisa berfaedah terutama bagi penulis dalam mempertajam kemampuan dan menganalisa mengenai upaya intervensi Australia sebagai great power di wilayah Pasifik Selatan pada Fiji pasca kudeta militer yang terjadi tahun 2006 yang menerepakan konsep Great Power dan teori Intervensi. Penelitian ini juga bertujuan khususnya agar lebih bertambahnya pemahaman serta wawasan pembaca terhadap kawasan Pasifik Selatan yakni Australia serta Fiji untuk peneliti sendiri serta peneliti selanjutnya sehingga penelitian ini mampu menjadi rujukan untuk penelitian selanjutnya.

### **1.4 Penelitian Terdahulu**

Pada penelitian ini terkait erat dengan penelitian sebelumnya, kemudian guna menerangkan orisinalitas penelitian ini, penulis lebih memfokuskan pada sebagian penelitian terdahulu yang perlu ditelaah, yang mempunyai kesamaan akan topik penelitian yang dilakukan. Dimana dalam penelitian ini memaparkan secara ringkas bacaan dalam bentuk literatur ilmiah seperti hasil penelitian akademika atau jurnal terdahulu kemudian dalam penelitian terdahulu ini, Peneliti merujuk lima penelitian yang mampu menyampaikan deskripsi tentang seperti apa peran politik, respon serta upaya intervensi Australia di kawasan sendiri serta bagaimana peristiwa yang sama timbul pada regional berbeda, maka dari itu mampu dianalisis dengan mengaplikasikan teori yang serupa.

**Penelitian pertama** adalah skripsi dari **Siti Dhea Meutia Syarif** dengan judul penelitian “**Analisis Hubungan Kerja Sama Bilateral Australia dan Fiji dalam Bidang Kemanan pada Periode 2014-2019**”.<sup>13</sup> Riset ini mengaplikasikan teori analisis kebijakan luar negeri. Jurnal ini membahas mengenai kolaborasi keamanan bilateral antara Australia dan Fiji pada era 2014 hingga 2019. Sejak periode pendemokrasian setelah kudeta Fiji tahun 2006, relasi antara Canberra dengan Suva kian pulih, ditandai dengan peningkatan inisiatif keamanan regional dan internasional. Penelitian ini berpendapat bahwa konvergensi kepentingan kedua negara dapat ditambahkan pada kesamaan pandangan mengenai defensi regional serta internasional yang kian menonjol pada zaman demokratisasi Fiji. Penelitian ini pun menjelaskan latar belakang hubungan kontemporer antara Australia dengan Fiji serta menelaah dinamika yang mendorong kolaborasi dan mengevaluasi prospek ketahanan hubungan bilateral mereka di masa depan mengingat munculnya tantangan keamanan baru.

**Penelitian kedua** yakni skripsi dari **Putu Bagus Honestya, Sukma Susanti, dan Adi P. Suwecawangsa**, dengan judul penelitian “**Analisis Keputusan Australia Menjatuhkan Sanksi Kepada Fiji Pasca Kudeta Militer**”.<sup>14</sup> Penelitian ini menerapkan pendekatan eksplanatif kualitatif yang mengaplikasikan teori politik luar negeri serta model aktor rasional. Sehingga dari pendekatan tersebut, Putu Bagus Honestya dkk, berusaha untuk menjelaskan dan menjabarkan analisis keputusan Australia menjatuhkan sanksi kepada Fiji Pasca

---

<sup>13</sup> Siti Dhea Meutia Syarif, *Analisis Hubungan Kerja Sama Bilateral Australia dan Fiji dalam Bidang Kemanan pada Periode 2014-2019*, Jurnal Hubungan Internasional, No, 2, Surabaya: Universitas Airlangga, hal. 217.

<sup>14</sup> Putu Bagus Honestya dkk, *Analisis Keputusan Australia Menjatuhkan Sanksi Kepada Fiji Pasca Kudeta Militer*, Jurnal Diksi, Vol, 1, No, 2, Bali: Universitas Udayana, hal. 1.

Kudeta militer. Jurnal ini membahas terkait mengevaluasi keputusan Australia dalam menerapkan kebijakan sanksi terhadap Fiji setelah kudeta militer tahun 2006. Analisa ini mengungkapkan alasan-alasan yang mendasari pemilihan kebijakan sanksi tersebut sebagai respons terhadap kudeta di Fiji.

**Penelitian ketiga** yakni skripsi dari **Wahyu Ariyawati** dengan judul penelitian **“Sikap Australia terhadap Kudeta Militer Fiji Tahun 2006”**. Hasil yang didapat dari penelitian Wahyu mengenai penjelasan bagaimana Australia dalam memberikan sanksi untuk membekukan keanggotaan Fiji yakni berupa pengajuan petisi terhadap dewan persemakmuran. Upaya yang dilakukan Australia sebagai salah satu bentuk sanksi terhadap Fiji pada tahun 2006 atas peristiwa yang terjadi. Australia menganggap bahwa Fiji sebagai federasi Australia, sehingga Australia berusaha dalam mendikte serta membangun setiap gerakan yang dilakukan Fiji dari sudut pandang militer, ekonomi dan politik.<sup>15</sup>

Intervensi yang dilakukan Australia di Fiji dengan melakukan beberapa kebijakan, dengan mengingat bahwa Australia partner dagang Fiji paling besar, adanya kudeta Fiji tahun 2006 membuat Australia membatasi kerja sama dagang, selain itu usaha yang dilakukan Australia yaitu dengan mengirimkan kapal di sekitar Fiji untuk berjaga-jaga.

Dalam penelitian Wahyu terdapat persamaan dengan penelitian saat ini yang terletak pada judul dalam objek yang diteliti. Terdapat perbedaan dalam penggunaan konsep teoritis, dalam penelitian Wahyu mencoba mendeskripsikannya dengan konsep kepentingan nasional dan juga menjelaskan

---

<sup>15</sup> Wahyu Ariyawati, 2009, *Sikap Australia Terhadap Kudeta Militer Fiji*, Skripsi, Yogyakarta: Jurusan Hubungan Internasional, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

apa yang menjadi sasaran kepentingan nasional Australia dalam memberikan sikap tersebut, perbedaan lainnya adalah dalam penggunaan konsep politik luar negeri, analisis politik luar negeri Australia diaplikasikan guna menegaskan kebutuhan nasional Australia terhadap Fiji dalam konflik kudeta tahun 2006.

**Penelitian keempat** yakni skripsi **Delia Putri Romadhona** yang berjudul **“Respon dan Sikap Politik Australia Terhadap Kudeta Militer Fiji Tahun 2006”**. Penelitian Delia menjelaskan pengimplementasian teori rezim interasional dalam menganalisis seperti apa pengaruh aktor terhadap konstelasi dunia internasional.<sup>16</sup> Penelitian Delia menguraikan bagaimana Australia dalam sebagai aktor pada sistem internasional yang mengubah serta menciptakan rezim pada wilayah regional serta internasional melalui beragam cara guna memengaruhi Fiji dalam mencapai demokratisasi. Australia berupaya dalam menunjukkan kemampuannya untuk mempengaruhi negara-negara lain menggunakan kemampuan dan kekuatannya sebagai negara great power, baik di kawasan regional dan internasional.

**Penelitian kelima** yakni skripsi **Yulvika Purwanti** yang berjudul **“Pengaruh Australia Terhadap Fiji Pasca Kudeta Militer Tahun 2006”**. Penelitian ini mengkaji tentang kudeta militer di Fiji yang menjadi ancaman di kawasan yang kemudian menarik perhatian dan perlakuan Australia terhadap Fiji untuk memberikan respon dan sikap untuk mendorong demokratisasi di Fiji untuk menjaga kestabilan di kawasan. Kudeta di Fiji dipandang menyalahi nilai demokrasi dimana pengambilalihan pemerintahan dengan paksa dan menghapus

---

<sup>16</sup> Delia Putri Romadhona, 2016, *Respon dan Sikap Politik Australia Terhadap Kudeta Militer Fiji Tahun 2006*, Skripsi, Malang: Jurusan Hubungan Internasional, Universitas Muhammadiyah Malang.

parlemen yang dipandang melanggar konstitusi demokrasi.<sup>17</sup> Australia telah melakukan beragam usaha, antara lain penelesaian sanksi dan penghentian keanggotaan Fiji dalam forum regional Pacific Island Forum (PIF).

Penelitian terdahulu yang dikutip di atas berbeda dengan penelitian ini dikarenakan pada penelitian ini berfokus pada intervensi Australia kepada negara lain di wilayah Pasifik Selatan termasuk Fiji, Australia sangat memperhatikan tingkat keamanan di negara kawasan pasifik selatan. Kudeta yang berlangsung di Fiji mendorong Australia untuk memberikan pengaruh terhadap kudeta tersebut ke dalam politik internal Fiji. Penelitian ini memaparkan Australia menjadi pihak yang hendak membangun serta mewujudkan demokrasi di Fiji. Australia melakukan Intervensi di Fiji pasca kudeta 2006 sebagai upaya dalam menstabilkan politik Fiji dan juga mewujudkan rezim di wilayah untuk memperkokoh eksistensi serta kekuatan Australia pada wilayah regional ataupun internasional.

Kudeta Fiji merupakan permasalahan penting yang ditanggapi oleh negara-negara besar Pasifik Selatan. Pada kudeta militer di Fiji tahun 2006, Australia berupaya menstabilkan dan menyelesaikan permasalahan di kawasannya. Selain Australia, New Zealand juga telah melakukan tindakan atau upaya untuk keamanan dalam negerinya dan strategi politik New Zealand. Australia memiliki kekuatan dalam memajukan dan membuat wilayah makin stabil untuk keamanan.

---

<sup>17</sup> Yulvika Purwanti, 2017, *Pengaruh Australia Terhadap Fiji Pasca Kudeta Militer Tahun 2006*, Skripsi. Malang: Jurusan Hubungan Internasional, Universitas Muhammadiyah Malang.

**Tabel 1. 1 Posisi Penelitian**

No.	Judul atau Nama Penelitian	Metode atau Pendekatan	Hasil Penelitian
1	Jurnal Siti Dhea Meutia Syarif “Analisis Hubungan Kerja Sama Bilateral Australia dan Fiji dalam Bidang Kemanan pada Periode 2014-2019”	Dalam jurnal Siti Dhea Meutia Syarif pendekatan yang digunakan adalah teori analisis kebijakan luar negeri	Relasi kerja sama keamanan di antara Australia dengan Fiji di era 2014 hingga 2019 menunjukkan karakteristik yang istimewa. Setelah kudeta militer terakhir di Fiji, Australia memberikan berbagai bentuk dukungan untuk menjaga perdamaian dan stabilitas regional. Bentuk kerja sama ini termasuk tugas diplomatik bersama pada Dataran Tinggi Golan, pemberian satuan Bushmaster terhadap militer Fiji, merestorasi Blackrock Camp, dan pembentukan Kemitraan Vuvale Australia-Fiji. Penganalisisan kebijakan luar negeri dari dua negara menunjukkan bahwa kerja sama ini menguntungkan bagi keduanya: Australia berupaya memperkokoh pengaruhnya di Pasifik dengan Fiji, sementara Fiji mencari keamanan dari ancaman eksternal dengan dukungan Australia. Namun, pengaruh Tiongkok yang semakin besar di kawasan ini mempengaruhi dinamika hubungan mereka, membuat kepentingan Australia lebih sulit tercapai. Meskipun demikian, tantangan kejahatan transnasional dan posisi strategis wilayah mereka mengharuskan dua negara



			guna menjalin kerja sama keamanan demi mempertahankan kestabilan regional.
2	Jurnal Putu Bagus Honestya, Sukma Susasnti, dan Adi P. Suwecawangsa “Analisis Keputusan Australia Menjatuhkan Sanksi Kepada Fiji Pasca Kudeta Militer”	Metode penelitian yang digunakan dalam jurnal Putu Bagus Honestya, Sukma Susasnti, dan Adi P. Suwecawangsa adalah metode penelitian eksplanatif dan pendekatan yang digunakan adalah teori politik luar negeri dan model aktor rasional.	Australia menetapkan untuk memeberikan sanksi terhadap Fiji setelah kudeta militer tahun 2006 berdasarkan analisis rasional terhadap berbagai cadangan kebijakan yang ada. Keputusan ini dibuat pasca memperhitungkan keuntungan dan dampak dari tiap pilihan. Penerapan sanksi dinilai sebagai pilihan terbaik dibandingkan dengan intervensi militer atau tidak mengambil tindakan sama sekali. Jika dianalisis menggunakan model aktor rasional, keputusan ini didorong oleh beberapa pertimbangan. Pertama, campur tangan militer hanya akan diterima jika timbul agresi HAM berat serta berpotensi merusak ikon internasional Australia. Kedua, tidak mengambil tindakan apapun akan merusak reputasi Australia sebagai kekuatan hegemon di Pasifik Selatan, menunjukkan ketidakmampuannya menjaga stabilitas di kawasan. Oleh karena itu, Australia memutuskan bahwa menjatuhkan sanksi adalah opsi dengan risiko dan konsekuensi paling sedikit. Langkah ini dianggap paling efektif untuk mencapai tujuan dan menjaga reputasi serta pengaruh Australia di kawasan Pasifik Selatan.

3	Skripsi Wahyu Ariyawati “Sikap Australia terhadap Kudeta Militer Fiji Tahun 2006”	Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi Wahyu Ariyawati adalah metode eksplanatif dan pendekatan yang digunakan adalah Kepentingan Nasioanl dan Kebijakan Luar Negeri	Australia dalam menyikapi kudeta Fiji 2006 yakni dengan bersikap memagari kerja sama perdagangan bersama Fiji. Australia mempersulit Fiji untuk meminjam uang dari negara-negara asing. Australia berusaha dalam mengevakuasi dan mengirim tiga kapal untuk berjaga di kawasan Fiji.
4	Skripsi Delia Putri Romadhona “Respon dan Sikap Politik Australia Terhadap Kudeta Militer Fiji Tahun 2006”	Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi Delia Putri Romadhona adalah metode penelitian eksplanatif dan pendekatan yang digunakan adalah Teori Rezim Internasional, Kudeta Militer dan Demokrasi.	Australia berupaya mengasingkan Fiji melalui penangguhan keanggotaan Fiji di Pacific Islands Forum (PIF) serta beragam corak kerjasama bantuan bersama Australia hal ini dilakukan untuk mendorong peningkatan pendemokrasian Fiji. Beragam usaha Australia guna membangun rezim pada wilayah dengan tujuan membela kekuatan serta keberadaan Australia secara regional ataupun internasional.
5	Skripsi Yulvika Purwanti “Pengaruh Australia Terhadap Fiji Pasca Kudeta Militer Tahun 2006”	Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi Yulvika Purwanti adalah metode penelitian eksplanatif dan pendekatan yang digunakan adalah Teori Regional Security Complex	Tanggapan Australia pada kudeta militer Fiji tahun 2006 yaitu guna menekankan keyakinan Fiji bahwasannya perselisihan domestik Fiji mampu mempengaruhi buruknya situasi keamanan regional. Australia, menjadi kekuatan regional berupaya untuk mendorong terciptanya stabilitas keamanan regional dalam reaksi dan sikapnya terhadap Fiji sehubungan dengan peristiwa kudeta militer tahun 2006.

## 1.5 Kerangka Konseptual

### 1.5.1 Konsep Great Power

Konsep Great Power adalah konsep yang mengacu pada negara yang mempunyai dampak serta kekuatan besar pada hubungan internasional, baik dari segi ekonomi, militer, politik, maupun budaya. Negara-negara tersebut memiliki kapasitas untuk memengaruhi dan membentuk kebijakan global dan regional.

Pada analisis hubungan internasional, power dipandang oleh ilmuwan menjadi suatu tujuan dalam mencapai tujuan dalam kata lain sebagai kapasitas atau kemampuan dalam mencapai tujuan dengan mempengaruhi pihak lain.<sup>18</sup>

Mearsheimer menafsirkan power sebagai kapasitas material suatu negara, yang dibagi menjadi dua wujud power, power militer serta power laten. Power militer dikembangkan sebagai kekuatan utama dalam bentuk kemampuan militer darat serta adanya dukungan dari kekuatan militer udara dan militer laut.<sup>19</sup> Sementara power laten mengacu pada atribut suatu negara, adalah sumber daya yang mampu berkontribusi pada perolehan ataupun pengembangan ketangguhan militer semacam, sumber daya alam dan manusia, populasi, nasionalisme, kekayaan ekonomi.

Bagi Mearsheimer, dimensi power merupakan faktor terbaik untuk mendapatkan pemahaman mengenai distribusi kekuatan di kawasan, dengan memahami hal tersebut memberikan gambaran mengenai model hubungan kekuatan, yang terwujud pada bipolar dengan hanya dua great power atau

---

<sup>18</sup> Griffiths, M, 2008, Terry O' Callaghan, Steve C. Roach. *International Relations The Key Concept*. New York: Routledge.

<sup>19</sup> Mearsheimer, J. J., & Alterman, G, 2001, *The tragedy of great power politics*. WW Norton & Company.

multipolar dengan postur great power yang lebih dari dua negara. Great Power ialah negara yang mempunyai keutamaan kekuatan komparatif (posisi ekonomi serta militer) atas negara lain pada kawasan.<sup>20</sup> Pembentukan diseminasi ketahanan pada sistem ini pada ujungnya akan menetapkan respon dan juga rencana yang dilaksanakan oleh great power untuk memburu kepentingan. Mearsheimer meyakini bahwa tujuan utama negara great power adalah hegemoni pada kawasan. Hegemoni adalah salah satunya cara yang ditentukan untuk mempertahankan kesinambungan hidup dan mengamankan kepentingannya sendiri.

Dalam upaya intervensi Australia sebagai Great Power terhadap Fiji pasca kudeta militer tahun 2006, konsep Great Power dapat dipandang sebagai faktor yang mempengaruhi intervensi tersebut. Sebagai Great Power, Australia memiliki kepentingan strategis dan keamanan yang besar di kawasan Pasifik dan memiliki kapasitas untuk mempengaruhi situasi politik serta keamanan di negara kecil pada kawasan tersebut.

Dalam hal tersebut, Australia dapat menggunakan kekuatannya sebagai Great Power untuk mempromosikan kepentingannya di kawasan, termasuk dalam upaya intervensi di Fiji pasca kudeta militer. Sebagai Great Power, Australia dapat menggunakan kekuatan militer dan ekonominya untuk memperkuat posisinya di kawasan Pasifik dan memperkuat pengaruhnya terhadap negara-negara kecil di kawasan.

Namun demikian, sebagai Great Power, Australia juga harus mempertimbangkan dampak dari intervensinya terhadap stabilitas dan keamanan

---

<sup>20</sup> *Ibid.*

regional. Intervensi yang terlalu agresif dan tidak diinginkan oleh negara-negara lain di kawasan dapat memicu konflik dan memperburuk keamanan regional. Oleh karena itu, konsep Great Power harus digunakan secara bijaksana dalam upaya intervensi untuk memperkuat keamanan dan stabilitas di kawasan Pasifik.

### 1.5.2 Teori intervensi

Teori intervensi merujuk pada pendekatan atau strategi yang digunakan untuk mencoba mengubah atau memperbaiki suatu situasi atau kondisi yang tidak diinginkan atau merugikan. Intervensi dapat berupa tindakan atau program yang dirancang untuk memperbaiki masalah atau situasi tertentu.<sup>21</sup>

Makna intervensi di berbagai bidang tidak selalu bersifat negatif, tetapi dapat memberikan pengaruh positif bagi kehidupan bernegara dan sosial budaya masyarakat. Akan tetapi, lebih banyak dinilai dari sisi negatifnya bahwa intervensi dianggap berlebihan.<sup>22</sup> Sebenarnya dilakukannya intervensi adalah untuk membantu terakait permasalahan yang terjadi.

Intervensi adalah negara yang ikut campur dengan cara diktator dengan negara lain bertujuan untuk melindungi sebuah negara atau mengubah kondisi aktual. Penjelasan lain mengenai teori intervensi menurut Lauterpach, Intervensi diartikan bahwa sebuah negara melakukan campur tangan dengan cara diktator dalam urusan negara lain dengan tujuan mempertahankan atau mengubah situasi, kondisi, atau objek di negara tersebut.<sup>23</sup>

---

<sup>21</sup> Soeprapto, R, 1997, *Hubungan Internasional; Sistem, Interaksi dan Perilaku*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. hal. 281.

<sup>22</sup> *Ibid.*

<sup>23</sup> Nugroho, F. A, 2021, *Legalitas Intervensi Militer Turki Dalam Konflik Bersenjata Suriah Berdasarkan Norma Hukum Internasional (Studi Kasus Operation Peace Spring)*.

Teori Intervensi dapat digunakan untuk menjelaskan upaya intervensi Australia sebagai Great Power terhadap Fiji pasca kudeta militer tahun 2006. Menurut teori intervensi, intervensi dapat dilakukan oleh negara atau organisasi internasional dalam rangka mengatasi konflik atau krisis di negara lain yang dapat membahayakan kepentingan internasional.

Dalam konteks upaya intervensi Australia kepada Fiji setelah kudeta militer tahun 2006, dapat dikatakan bahwa Australia melakukan intervensi dengan tujuan mengatasi krisis politik dan keamanan di Fiji yang dapat membahayakan kepentingan Australia di kawasan Pasifik. Dalam hal ini, Australia melihat bahwa stabilitas politik dan keamanan di Fiji memiliki dampak yang signifikan bagi keamanan regional dan kepentingan Australia di kawasan Pasifik.

Upaya intervensi Australia kepada Fiji setelah kudeta militer tahun 2006 dapat dijelaskan melalui beberapa tahap intervensi menurut teori intervensi, antara lain:

1. Identifikasi krisis: Australia mengidentifikasi adanya krisis politik dan keamanan di Fiji setelah terjadinya kudeta militer tahun 2006.
2. Justifikasi intervensi: Australia membenarkan intervensinya dengan alasan melindungi kepentingan internasional, yaitu melindungi kestabilan politik serta keamanan di wilayah Pasifik dan melindungi kepentingan Australia di kawasan tersebut.
3. Penentuan bentuk intervensi: Australia memilih untuk melakukan intervensi melalui diplomasi dan bantuan pembangunan, serta melalui tekanan internasional terhadap pemerintah militer Fiji.

4. Pelaksanaan intervensi: Australia melakukan intervensi dengan memberikan bantuan dan dukungan pembangunan kepada Fiji, serta melakukan tekanan internasional terhadap pemerintah militer Fiji agar kembali ke jalur demokrasi.
5. Evaluasi intervensi: Setelah intervensi dilakukan, Australia melakukan evaluasi terhadap keberhasilan intervensi untuk menggapai tujuan yang telah ditentukan.

Dalam keseluruhan proses intervensi tersebut, Australia melihat dirinya sebagai Great Power yang memiliki tanggung jawab untuk memperjuangkan kepentingan internasional dan membantu negara-negara yang sedang mengalami krisis. Oleh karena itu, teori intervensi dapat menjelaskan upaya intervensi Australia sebagai Great Power terhadap Fiji pasca kudeta militer tahun 2006.

Penelitian ini meneliti latar belakang mengenai upaya intervensi terhadap Fiji oleh Australia pada kudeta militer tahun 2006 yang ditelaah mengaplikasikan teori yang dapat menjelaskan mengenai intervensi yang diberikan Australia sebagai Great Power di Kawasan Pasifik Selatan untuk menanggapi kudeta militer Fiji serta pengaruh terhadap stabilitas politik dan keamanan kawasan. Karena keamanan yang secara geografis saling berdekatan satu kawasan dapat mempengaruhi satu sama lain.

Kudeta militer Kekacauan politik yang terjadi di Fiji pada tahun 2006 tidak terlepas dari semua unsur ancaman keamanan di kawasan tersebut. Dari perspektif kompleks keamanan regional, keamanan tidak sepihak, dan sejalan dengan itu, kerusuhan yang disebabkan kudeta militer yang diketuai oleh

Bainimarama, tak hanya menyebabkan ketidakstabilan politik, ekonomi serta sosial di Fiji, dan berimplikasi pada kemampuan besar untuk menyebar ke negara lain di Pasifik Selatan.

Hadirnya kemampuan ancaman tersebut menyebabkan negara tetangga, terutama Australia, mementingkan keamanan kawasan dan turut serta dalam penanggulangannya satu demi satu. Ada dua elemen yang menafsirkan keamanan kompleks pada wilayah, yang pertama ialah diseminasi ataupun distribusi kekuasaan antar negara dalam wilayah geografis tertentu, dan yang kedua yaitu histori motif kerja sama serta konflik yang ada antar negara.

Tidak dapat dipungkiri bahwa relasi yang terbina antara satu negara ke negara lain di wilayah yang sama membentuk satu mata rantai yang dapat mempengaruhi negara-negara lain di kawasan tersebut, dan jika terjadi masalah atau perubahan kebijakan di satu negara sulit untuk dicegah. Dampak pada negara lain dengan hubungan tetangga atau kerjasama.

Relasi jejaring atau koneksi yang dipegang oleh negara di kawasan yang sama dapat dibentuk dan dapat dibagi menjadi beberapa kategori, yaitu dari segi kedekatan geografis, sudut pandang politik, strategis saling mendukung, latar belakang sejarah, aspek ekonomi serta sosial yang ada antar negara. Budaya negara tersebut. Sejumlah argumen ini mampu diangkat sebagai tolak ukur guna mengamati seperti apa relasi antar negara pada suatu regionalisme dikoordinasikan serta dibentuk, tindakan yang dilaksanakan Australia dalam menanggapi kudeta militer di Fiji walaupun itu adalah masalah domestik di Fiji, Australia adalah negara di kawasan, dan Fiji adalah anggota PIF, mencoba



menanamkan pandangan keamanan bersama di Fiji, dikarenakan walaupun dengan kudeta militer di Fiji, namun jika tidak segera diselesaikan menjadi pemicu dampak ketidakamanan untuk negara lain di wilayah Pasifik Selatan. Dengan dimilikinya daya tawar tinggi oleh Australia baik dalam segi sosial dan ekonomi terhadap Fiji dan terlebih investasi serta bantuan yang diberikan oleh Australia kepada Fiji, Australia dipandang sebagai negara dengan strategi baik dalam menempatkan diri sebagai pihak tegas mengenai pentingnya bagi negara-negara di kawasan sebuah keamanan regional.

## **1. 6 Metode Penelitian**

### **1.6.1 Tipe Penelitian**

Pada riset ini yang ingin penulis teliti mampu ditelaah berdasarkan rumusan masalah yang ada yaitu mengapa Australia sebagai negara Great Power melakukan intervensi terhadap Fiji pasca kudeta militer pada tahun 2006? Dengan demikian peneliti menggunakan Eksplanatif dalam menjelaskan kedua variabel dalam penelitian ini. Penelitian eksplanatif yang memiliki tujuan dalam menguraikan relasi antara dua maupun lebih variabel.<sup>24</sup> Peneliti mencoba menguraikan upaya intervensi Australia terhadap Fiji pasca kudeta militer yang mengaplikasikan teori serta isu yang menunjang pendapat dari teori dalam penelitian ini.

---

<sup>24</sup> Ulber Silalahi, 2012, *Metode Penelitian Sosial*, Bandung: PT. Riefka Aditama, hal. 30.

### **1.6.2 Level Analisa**

Pada penelitian ini, penting guna menentukan tingkat analisis yang tepat agar memudahkan analisisnya. Penelitian ini menggunakan pendekatan induksionis yang mana penulis akan menelaah upaya intervensi Australia pada tingkat negara bangsa sebagai unit analisis, sementara kudeta Fiji yang mempengaruhi stabilitas regional dipertimbangkan pada tingkat sistem sebagai unit eksplanasi.

Pada penelitian ini, fokus utama adalah pada upaya intervensi Australia sebagai fenomena yang diselidiki, menjadikannya variabel dependen ataupun unit analisis. Sementara, kudeta di Fiji dianggap sebagai faktor yang mempengaruhi perilaku unit analisis tersebut, yaitu upaya intervensi Australia. Dengan kata lain, dampak kudeta Fiji terhadap stabilitas regional memicu respons dari Australia untuk ikut campur dalam kudeta tersebut. Hal ini mengarah pada pembentukan sebuah model penelitian dengan pendekatan induksionis, di mana level unit analisis berada di bawah level unit eksplanasi yang lebih tinggi.

### **1.6.3 Teknik Pengumpulan Data**

Dalam riset ini mengaplikasikan metode pengumpulan informasi dan literatur yang dilaksanakan dan mencari sumber serta data penelitian melalui pustaka dengan cara mengumpulkan literature serta data yang diperlukan pada penelitian ini terakait dengan masalah mengapa Australia sebagai negara great power melakukan intervensi terhadap kudeta Fiji tahun 2006, yang kemudian menjadi dianalisis lewat beragam sumber literature, mengumpulkan data yang bersumber pada buku, jurnal, dokumen, majalah, surat kabar, portal resmi online

dan laporan yang dapat membantu penelitian ini guna memperkuat pendapat peneliti yang berhubungan erat pada teori dalam penelitian ini.

#### **1.6.4 Metode Analisa Data**

Metode analisa data yang digunakan dalam riset ini ialah metode kualitatif. Penulis menelaah masalah dengan mengaitkan berbagai fakta yang ada, menghubungkannya dengan fakta-fakta lain, sehingga menghasilkan argumen yang tepat dan kuat.

#### **1.6.5 Ruang Lingkup Penelitian**

##### **1.6.5.1 Batasan Materi**

Batasan materi riset ini difokuskan dalam upaya Intervensi Australia yang dilancarkan terhadap Fiji pasca kudeta tahun 2006, Australia sebagai salah satu negara yang berupaya dalam memulihkan demokrasi Fiji, langkah tersebut dilakukan oleh pemerintah Australia menjadi tanggapan atas aksi kudeta militer tahun 2006 yang dipimpin Frank Bainimarama dengan menggulingkan pemerintahan sipil pada saat itu. Pemerintah Australia melaksanakan hal ini guna untuk berlangsungnya efek domino terhadap negara di kawasan Pasifik Selatan lainnya.

##### **1.6.5.2 Batasan Waktu**

Batasan waktu riset yaitu dimulai pasca kudeta militer di tahun 2006, dalam pengambilan data pada cakupan tahun 2006-2014, di tahun merupakan pemilu perdana Fiji pasca kudeta tahun 2006. Australia pun mencopot seluruh wujud sanksi yang diberi terhadap Fiji semenjak tahun tersebut.

## 1.7 Hipotesa

Konflik yang timbul akibat kudeta militer di Fiji tahun 2006 yang diketahui atas Bainimarama sebenarnya adalah masalah domestik dalam negeri Fiji. Tetapi, dikarenakan berpeluan memicu fluktuasi keamanan pada kawasan, Australia awalnya memutuskan berpendirian pasif dalam ikut serta pada pemasalahan domestik Fiji alhasil Australia memiliki sejarah intervensi yang signifikan di Fiji setelah kudeta militer pada tahun 2006. Campur tangan Australia di Fiji setelah kudeta militer tahun 2006 dipengaruhi oleh kepentingan nasional Australia di kawasan Pasifik Selatan. Kepentingan nasional Australia, seperti keamanan regional, stabilitas politik, dan pengaruh ekonomi, mendorong negara ini guna terlibat aktif dalam menangani krisis politik di Fiji. Efektivitas intervensi Australia di Fiji ini dipengaruhi oleh tanggapan dan resistensi dari pemerintah militer Fiji serta reaksi negara-negara tetangga dan organisasi internasional. Tanggapan dari pemerintah militer Fiji, dan dukungan atau penolakan dari negara-negara lain dan organisasi internasional, berperan penting dalam menentukan keberhasilan maupun kegagalan upaya intervensi Australia. Walaupun menghadapi berbagai hambatan, termasuk resistensi lokal dan kompleksitas politik, upaya intervensi Australia memiliki dampak positif dalam jangka panjang terhadap pemulihan demokrasi di Fiji.

Setelah kudeta tersebut, Australia termasuk dalam negara-negara yang berusaha mengambil tindakan untuk mengembalikan demokrasi di Fiji dan memulihkan stabilitas politik di negara tersebut. Melalui analisa dengan menggunakan konsep great power dan teori intervensi didapatkan bahwa upaya

intervensi Australia sebagai negara great power terhadap Fiji pasca kudeta militer tahun 2006 yaitu pertama, sebagai great power, Australia memberlakukan sanksi dan pembatasan terhadap rezim militer Fiji. Ini termasuk pembekuan bantuan luar negeri, larangan perjalanan bagi pejabat pemerintah Fiji, dan pembatasan perdagangan. Yang kedua Australia juga secara aktif terlibat dalam upaya diplomasi untuk merestorasi pemerintahan sipil di Fiji dengan melakukan dialog dengan pemimpin kudeta dan negara-negara regional lainnya dalam upaya mencapai solusi politik yang dapat diterima oleh semua pihak. Australia juga memberikan dukungan dan bantuan kepada Fiji dalam memulihkan demokrasi, dengan memfasilitasi dialog politik, pemilihan umum, dan reformasi institusi untuk membangun kembali lembaga-lembaga demokrasi di Fiji. Australia berupaya dalam memberikan bantuan pembangunan untuk membantu memulihkan ekonomi dan infrastruktur Fiji pasca kudeta. Bantuan ini mencakup program-program untuk mengembangkan sektor pertanian, pariwisata, pendidikan, dan kesehatan. Australia juga menggunakan keanggotaannya dalam Forum Kepulauan Pasifik untuk memobilisasi dukungan regional terhadap pemulihan demokrasi di Fiji. Mereka bekerja sama dengan negara-negara Pasifik lainnya dalam mengambil tindakan yang diperlukan untuk memulihkan stabilitas politik di kawasan tersebut.

Bantuan pembangunan yang diberikan Australia untuk membantu memulihkan ekonomi dan infrastruktur Fiji pasca kudeta dapat dianggap sebagai bentuk intervensi, karena intervensi tidak selalu harus bersifat militer atau politik secara langsung. Bantuan pembangunan sering dilakukan sebagai alat dalam

mencapai tujuan politik dan ekonomi. Dalam konteks ini, Australia berupaya memperkuat stabilitas dan pembangunan Fiji ini yang pada gilirannya mampu membantu mewujudkan lingkungan politik yang lebih stabil serta menekan risiko ketidakstabilan yang dapat memengaruhi kawasan Pasifik Selatan. Dengan memberi bantuan pembangunan, Australia memperoleh pengaruh signifikan atas kebijakan dan arah pembangunan Fiji. Bantuan ini berpeluang bagi Australia untuk mempromosikan nilai-nilai demokrasi, good governance, dan reformasi ekonomi yang sejalan dengan kepentingan strategisnya. Melalui bantuan pembangunan, Australia juga menjalankan *soft power*, di mana negara tersebut menggunakan kekuatan non-militer untuk mempengaruhi negara lain.

Australia khawatir kudeta ini akan memengaruhi negara di Pasifik Selatan, kemungkinan akan menekan koherensi serta kelangsungan relasi regional diantara negara-negara Pasifik, terutama Australia, maka dalam hal ini Australia dapat menggunakan kekuatannya sebagai Great Power untuk mempromosikan kepentingannya di kawasan, termasuk dalam paya intervensi di Fiji pasca kudeta militer tersebut. Intervensi yang dilakukan oleh Australia sebagai great power kawasan terhadap Fiji, ditujukan guna memaksa Fiji agar mengambil sikap serentak terhadap keamanan serta segera menuntaskan ketidakstabilan politik efek kudeta. Australia juga memajukan Fiji guna melindungi stabilitas politik serta keamanan di kawasan. Intervensi Australia di Fiji lebih banyak bersifat ekonomi, politik dan diplomatik. Australia memberikan bantuan pembangunan guna memulihkan ekonomi dan infrastruktur Fiji, serta menggunakan kekuatan

diplomatknya untuk menekan Fiji agar menyelesaikan ketidakstabilan politik agar demokratis kembali.

## 1.8 Sistematika Penulisan

Pada riset ini dituliskan melalui lima bab atau bagian agar lebih mudah memahami yakni sistematika sebagai berikut:

**Tabel 1. 2 Sistematika Penulisan**

<p><b>BAB I Pendahuluan</b></p>	<p>1.1. Latar Belakang            1.2. Rumusan Masalah            1.3. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian                1.3.1 Tujuan Penelitian                1.3.2 Manfaat Penelitian                    1.3.2.1 Manfaat Akademis                    1.3.2.2 Manfaat Praktis            1.4. Penelitian Terdahulu            1.5. Landasan Teori                1.5.1 Konsep Great Power                1.5.2 Teori Intervensi            1.6. Metodologi Penelitian                1.6.1 Tipe Penelitian                1.6.2 Level Analisa                1.6.3 Teknik Pengumpulan Data                1.6.4 Metode Analisa Data                1.6.5 Ruang Lingkup Penelitian                    1.6.5.1 Batasan Masalah                    1.6.5.2 Batasan Waktu            1.7. Hipotesa            1.8. Sistematika Penulisan</p>
<p><b>BAB II Hubungan Antara Australia Dengan Fiji</b></p>	<p>2.1 Sejarah Kudeta Fiji                2.1.1 Latar Belakang Kudeta Tahun 2006                2.1.2 Kronologi Kudeta Fiji Tahun 2006            2.2 Dampak Kudeta Terhadap Hubungan Australia dan Fiji            2.3 Perubahan Sikap Australia dan Fiji Dalam Bidang Keamanan Pasca Kudeta Militer            2.4 Signifikansi Strategis Fiji Bagi Australia Dalam Kudeta Militer 2006            2.5 Pergolakan Hubungan Fiji dan Australia</p>

<b>BAB III Intervensi Australia Sebagai Great Power di Kawasan Terhadap Fiji Paca Kudeta Tahun 2006</b>	3.1 Intervensi Australia Terhadap Fiji Setelah Terjadi Kudeta Tahun 2006 3.1.1 Upaya Demokratisasi Fiji oleh Australia 3.1.2 Penangguhan Keanggotaan Fiji di PIF ( <i>Pacific Island Forum</i> ) 3.1.3 Sanksi-Sanksi oleh Australia Terhadap Fiji 3.1.4 Pembekuan Bantuan Militer 3.2 Sikap Politik Australia Terhadap Kudeta Militer Fiji Tahun 2006
<b>BAB IV Penutup</b>	4.1 Kesimpulan 4.2 Saran

